

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya kegiatan pariwisata pada destinasi wisata, akan erat hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Foy (1994), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara masyarakat didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi berkembang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan. Menurut Sulistiyani (2004), Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan suatu masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011, perihal Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional pada Pasal 1 mengatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan” dan Pasal 28 huruf c yang menyatakan bahwa arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi: Pertama, pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata. Kedua, optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata. Ketiga, peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata. Keempat, penyusunan regulasi dan pemberian isentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, penguatan kemitraan rantai nilai antara usaha di bidang Kepariwisata. Keenam, perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal. Ketujuh, peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal. Kedelapan, peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat. Kesembilan, peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

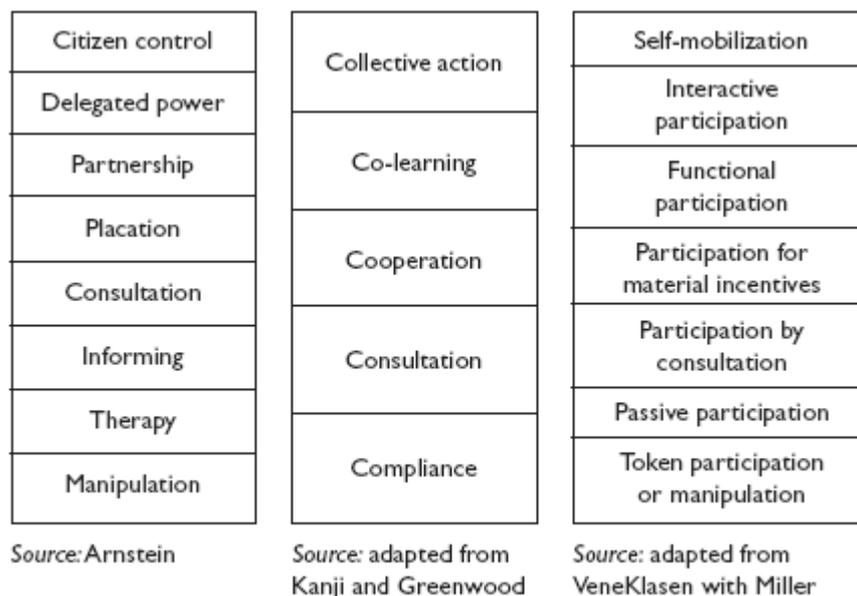
Pemangku kepentingan dalam pariwisata merupakan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, dan masyarakat sebagai tuan rumah dan pelaku atau pelaksana pariwisata, dan swasta sebagai penyedia industri atau pengembang dan sebagai investor (Sunaryo, 2013). Dari ketiga pemangku kepentingan pariwisata ini memang memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tujuan utama dalam mengembangkan pariwisata yang melibatkan peran masyarakat secara aktif memang untuk memberdayakan masyarakat, memperbaiki ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah setempat. Secara teoritis, semakin berperan aktif masyarakat dalam aktivitas pariwisata maka kesempatan kerja masyarakat juga akan semakin terbuka sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat. Menurut Sumodiningrat (1999), implementasi pemberdayaan masyarakat terdapat lima indikator keberhasilan sebagai berikut ini: Yang pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin di masyarakat sekitar. Kedua, berkembangnya peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat sekitar. Ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Keempat, meningkatnya kemandirian masyarakat yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha masyarakat. Kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan

pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosialnya. Maka dari itu, pemerintah selanjutnya berupaya untuk mendorong peran serta masyarakat guna untuk mengatasi masalah dalam perekonomian. Untuk mengupayakan partisipasi masyarakat, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, menyediakan wadah tempat berpartisipasi masyarakat, memberikan pengarahan, petunjuk sehingga masyarakat mengetahui partisipasi yang selanjutnya diberikan masyarakat dan bagaimana berpartisipasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Bratakusumah (1999), beliau menjelaskan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan pada partisipasi masyarakat. Pembangunan partisipatif memiliki erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat karena pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan pada masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111). Adanya beberapa alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pemberdayaan dikarenakan masyarakatlah yang menjadi sasaran utama sebagai penggerak, pengelola, pengguna hasil dari pemberdayaan tersebut. Adanya partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan lebih terarah sehingga rencana atau program pembangunan yang disusun tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendapat tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Conyers (1991), mengatakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta program akan gagal. Maka dari itu, masyarakat harus terlibat mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah bukan lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi segenap perencanaan pembangunan. Diartikan bahwa pemerintah seharusnya memberikan

kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat. Dengan kata lain bagaimana harus dapat mengkondisikan agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subjek pembangunan yang dominan menentukan keberhasilan pembangunan (Kartasasmita, 197).

Partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Robert (2005), menyebutkan ada tiga model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat delapan tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood yang membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi lima tingkatan. Sedangkan Vene Klasen dengan Miller, membagi jenjang partisipasi berjumlah tujuh tingkatan. Dari beberapa pendapat para teoritis, intinya pencapaian yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan model partisipasi masyarakat menurut para ahli :



Gambar 1.1 Teori Model Partisipasi Masyarakat

Sumber: Khotimah, 2017

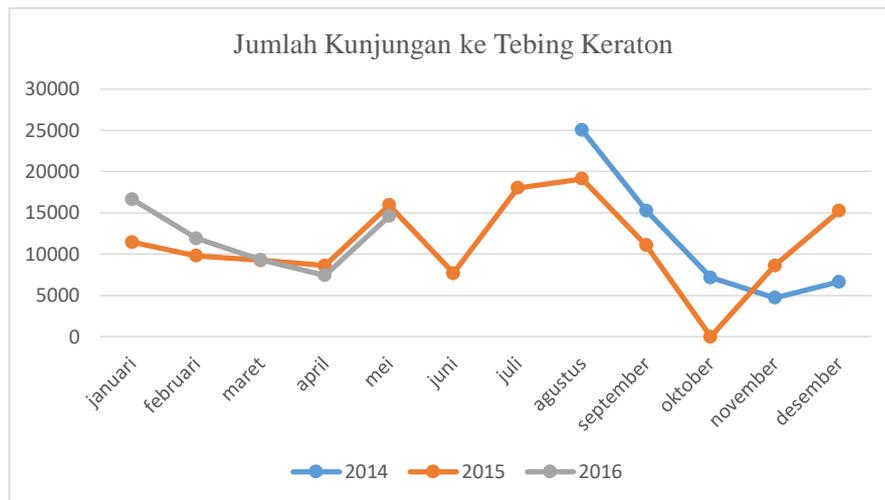
Menurut Robert (2005), jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Ketiga model

partisipasi masyarakat tidak memiliki klaim yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar. Sigit (2015), mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi diatas yang terbagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), meliputi *manipulation dan therapy*. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing, consultation, dan placation*. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership, delegated power, dan citizen power*. Dari pernyataan tersebut, partisipasi yang sangat diharapkan dalam pemberdayaan masyarakat pada kawasan wisata yaitu harus ada pada kelompok *degress of citizen power*, karena pada tahap ini disebut dengan partisipasi atau dalam peristilahan Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat. Ade (2017), dalam penelitiannya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati, menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di wilayah tersebut, karena selama ini pariwisata yang dikembangkan di desa wisata tersebut tidak pernah di desain oleh mereka. Pariwisata yang dikembangkan oleh orang luar desa, sehingga masyarakat lokal terpinggirkan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat belum menjadi subjek utama pembangunan, namun masih menjadi objek pembangunan karena kesempatan untuk berpartisipasi masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menganalisis tingkat partisipasi dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat menjadi penting dilakukan. Dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155), dijabarkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi terhadap kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakatnya, karena tanpa kehadiran masyarakat akan menyebabkan program pembangunan serta proyek lainnya akan gagal, kemudian masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan, mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut, selanjutnya suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Saat ini sudah banyak

kawasan wisata yang diklaim oleh pemerintah daerah dan telah melibatkan masyarakat didalamnya, namun tetap saja masih banyak permasalahan perihal kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arnstein (1969), partisipasi masyarakat semu terdapat pada kelompok *degrees of tokenism* karena masyarakatnya belum memiliki kekuasaan. Hal tersebut akan berdampak pada konsep pemberdayaan, karena peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya, sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan ataupun konflik dalam masyarakat desa tersebut (Aan, 2017).

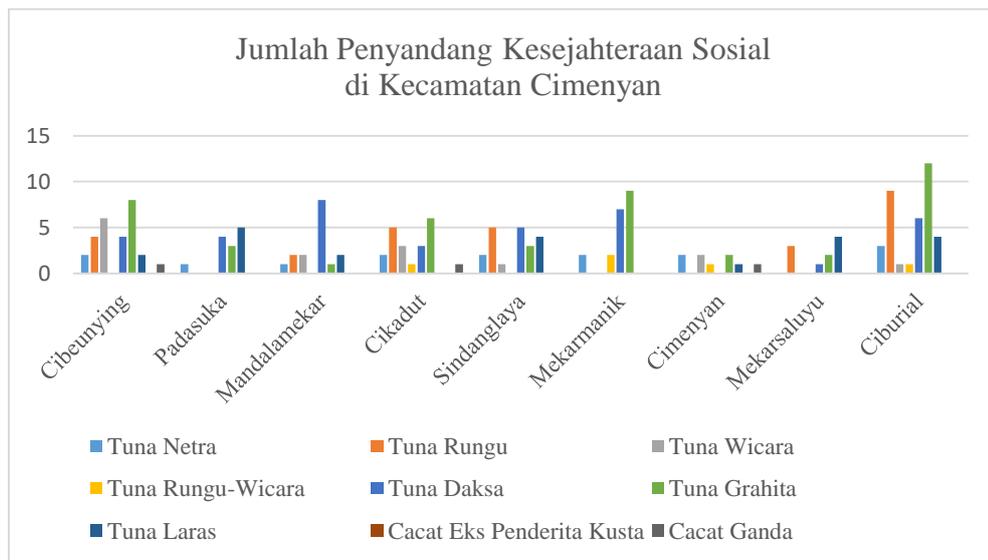
Salah satu desa yang dijadikan sebagai desa wisata dengan konsep pelibatan masyarakat yaitu Desa Ciburial (Baban, 2019). Desa Ciburial diresmikan menjadi desa wisata pada tahun 2011 melalui Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/kop.71-dispopar/2011 tentang penetapan Desa Wisata. Desa Ciburial memiliki keunggulan wisata di kebudayaan berupa permainan tradisional serta peternakan lebah madu. Namun pada saat ini, daya tarik wisata di Desa Ciburial adalah Tebing Keraton yang merupakan sebuah tebing berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 575/Kpts/Um/1980, kawasan Tebing Keraton dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi terhitung sejak 1980 dengan seluas 590 Ha. Daya tarik yang dimiliki oleh Tebing Keraton yaitu menikmati pemandangan hamparan hutan dari atas tebing. Meskipun merupakan wisata baru, tetapi Tebing Keraton sudah banyak dikunjungi sehingga sudah dapat dikategorikan sebagai destinasi wisata, karena telah memiliki akses jalan, tersedianya pemondokan, dan fasilitas penunjang lainnya.



Gambar 1.2 Jumlah Kunjungan ke Tebing Keraton

Sumber: Disparbud Kabupaten Bandung

Dari grafik diatas, wisatawan selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Maka pengembangan pariwisata di Desa Ciburial diperlukan dukungan dari setiap pihak baik itu pemerintah, swasta dan tentunya masyarakat sekitar. Peran masyarakat dalam pariwisata sangatlah penting karena masyarakat dapat membantu secara langsung keberlanjutan dari Desa Ciburial sebagai Desa Wisata, serta masyarakat dapat mendapatkan keuntungan langsung dari kegiatan wisata seperti di Tebing Keraton, kegiatan budaya setempat, dan budidaya madu. Sehingga dapat tercapai apa yang diharapkan dan juga dapat meminimalisasi dampak yang nantinya dapat ditimbulkan. Peran serta masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Ciburial sangatlah penting karena masyarakat disini yang akan menjadi pengelola Desa Wisata itu sendiri sehingga dapat berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.



Gambar 1.3 Grafik Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Cimenyan Tahun 2017

Sumber: Data Kecamatan Cimenyan 2018

Tahun ¹ Year ¹	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/ month)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribus) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Depth Index</i>	Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	217.452	296,3	9,3	1,14	0,24
2011	228.092	292,2	8,99	1,72	0,5
2012	239.253	277,8	8,32	1,39	0,37
2013	256.733	271,7	7,94	1,13	0,25
2014	264.129	266,8	7,65	0,82	0,12
2015	275.562	281,0	8,00	1,52	0,43
2016	297.483	272,7	7,61	1,00	0,18
2017	310.569	268,0	7,36	1,12	0,26
2018	334.929	246,1	6,65	0,87	0,20
2019	345.177	223.21	5.94	1.04	0.28

Gambar 1.4 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung

Sumber: Data Kecamatan Cimenyan 2020

Anggita Putri, 2021

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA CIBURIAL KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Jika dilihat dari grafik dan tabel diatas, walaupun wisatawan banyak berkunjung tetapi kerjasama pemerintah dan masyarakat sekitar masih sulit terealisasi, akibatnya indeks kemiskinan masih tinggi. Penelitian terdahulu oleh Nurwahab (2017), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat Desa Ciburial dalam pengembangan program pemberdayaan masih mencapai kategori rendah seperti partisipasi ide atau pikiran, keterampilan dan sosial. Penelitian lain menyebutkan bahwa Dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata tersebut, adapun kekurangan yang menjadikan partisipasi masyarakat kurang maksimal. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Ciburial akan pentingnya pengembangan desa wisata serta pengelolaan yang kurang maksimal sehingga dibuatlah *Plan Of Treatment* untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar masyarakat lebih memahami program desa wisata di Desa Ciburial dan memaksimalkan pengelolaannya melalui kegiatan *Capacity Building Tourism* (Rizky, 2014). Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh wawancara pra-penelitian yang telah dilakukan peneliti. Hilman (2021) selaku staff Desa Ciburial, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebelum masa pandemi di Desa Ciburial belum memenuhi beberapa indikator keberhasilan pada program pemberdayaan masyarakat, hal tersebut disebabkan karena belum adanya sinergitas antara pengelola dengan beberapa masyarakat sekitar, dan peraturan desa wisata yang belum maksimal sehingga membuat masyarakat sekitar menjadi tidak peduli dalam pengembangan kegiatan wisata sekitar.

Berdasarkan uraian masalah diatas dan pengamatan penulis di lokasi, dengan melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Ciburial dan dengan adanya dukungan pemerintah daerah menjadikan Desa Ciburial sebagai salah satu dari sepuluh Desa Wisata di Kabupaten Bandung. Namun, perihal pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan akibat tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, maka fenomena ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan konsep pemberdayaan masyarakat untuk desa wisata. Oleh karena itu untuk melakukan analisis hal tersebut, penulis

tertarik akan melakukan penelitian di Desa Ciburial dengan judul **“ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA CIBURIAL KABUPATEN BANDUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka muncul rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Ciburial?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Ciburial?
3. Bagaimana keterkaitan antara partisipasi dengan tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Ciburial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka muncul tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Ciburial.
2. Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Ciburial.
3. Mengidentifikasi keterkaitan antara partisipasi dengan tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Ciburial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis, pembahasan ini dapat memberikan pengalaman secara personal dan menambah wawasan mengenai bidang pariwisata yang diaplikasikan secara langsung.
2. Bagi pengelola kawasan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk diaplikasikan di Desa Ciburial.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Ciburial.
4. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengkaji kebijakan dan menjadi masukan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat di Desa Ciburial.
5. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemberi informasi mengenai Desa Ciburial sebagai salah satu kawasan wisata di Jawa Barat dan dapat menjadi sumber data bagi peneliti selanjutnya.
6. Bagi Program Studi Manajemen Resort dan Leisure Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Urutan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dan uraian yang akan disajikan pada setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori para ahli mengenai pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Menguraikan mengenai lokasi penelitian, desain penelitian, populasi, sampel, teknik penelitian, variabel penelitian, operasional variabel, instrumen, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, jenis, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dan pembahasan terkait pertanyaan peneliti yang berada di rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN